

“HUBUNGAN ASUPAN GIZI MAKRO DAN MIKRO TERHADAP KEJADIAN STUNTING PADA BALITA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS BARANA KELURAHAN BULUJAYA KECAMATAN BANGKALA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2023”

Gayatri Indah Pratiwi ¹, Rima January ²

¹Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar Angkatan 2020/email...@gmail.com

²Dosen Pembimbing

ABSTRAK

Latar Belakang: Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di atas wilayah laut menimbulkan konflik norma antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. UUPA membatasi pemberian hak atas tanah pada wilayah darat, sedangkan PP 18/2021 memungkinkan penerbitan SHGB di atas wilayah laut, yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi sengketa. **Tujuan Penelitian:** Menganalisis dasar hukum penerbitan SHGB di atas wilayah laut, mengidentifikasi konflik norma antara UUPA dan PP 18/2021, serta mengkaji dampaknya terhadap kepastian hukum. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Sumber data meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. **Hasil:** Penerbitan SHGB di atas wilayah laut berdasarkan PP 18/2021 bertentangan dengan ketentuan UUPA yang membatasi pemberian hak atas tanah pada wilayah darat. Ketidakselarasan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penerbitan SHGB di wilayah laut. **Kesimpulan:** Penerbitan SHGB di atas wilayah laut memerlukan harmonisasi antara UUPA dan PP 18/2021 untuk menciptakan kepastian hukum dan menghindari potensi sengketa.

Kata Kunci: Sertifikat Hak Guna Bangunan, wilayah laut, konflik norma, kepastian hukum.